

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara sudah lebih dari delapan tahun yang lalu, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi. Perjuangan masyarakat bersama elite lokal menjadi sebuah saksi perjuangan dari beberapa fase yang dilakukan dari tahun ke tahun. Meskipun saat ini Bangka Utara belum terbentuk, namun perjuangan terus berlanjut.

Peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator atau dukungan yang ada. Adapun dukungan tersebut yaitu dukungan pendanaan terkait dengan sumbangan sukarela yang disumbangkan oleh elite lokal untuk menunjang proses pembentukan Kabupaten Bangka Utara, misalnya untuk konsumsi, transportasi, dan lain-lain.

Selanjutnya terkait dukungan sarana dan prasarana, pihak kecamatan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara, contohnya menyediakan rumah dinas camat sebagai tempat pertemuan, sekretariat presidium perjuangan, dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan lainnya juga terlaksana di beberapa

daerah di luar Pulau Bangka dan bisa disediakan sarana dan prasarana dari elite yang ada di daerah tersebut.

Kemudian, dukungan fasilitasi kegiatan dalam pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Berbagai kalangan yang di dalamnya ada pihak pemerintahan, tokoh pemuda, dan tokoh akademisi memfasilitasi kegiatan sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan dalam memfasilitasi kegiatan sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing.

Di balik ketiga dukungan tersebut, terdapat pula dukungan pengelompokan elite yang memudahkan proses pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Pengelompokan elite yang bukan hanya berada di Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip, Sungailiat, atau daerah lainnya dapat memudahkan proses. Akses yang ada di setiap daerah memungkinkan adanya perwakilan dalam mendukung ketiga dukungan sebelumnya. Dukungan pendanaan, dukungan sarana prasarana, dan dukungan fasilitasi kegiatan dapat dijangkau lebih mudah karena adanya pengelompokan elite di wilayah tertentu.

Dukungan pengelompokan elite memberikan manfaat yang baik, akan tetapi hal ini juga terdapat kendala. Kendala dari pengelompokan elite yaitu adanya kurang kepercayaan antara elite yang satu dan yang lainnya. Kendala ini muncul karena tidak semua elite yang ikut berperan,

jadi hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran antar elite itu sendiri dalam mengupayakan rencana pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Kemudian dukungan modal sosial dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara juga sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari modal sosial eksklusif dan inklusif dapat saling terhubung atau berkaitan satu sama lainnya untuk menunjang proses yang dilakukan. Kedua modal sosial ini berjalan di dalam kepercayaan, norma, dan jaringan. Pada umumnya kepercayaan masyarakat, kepercayaan dalam diri elite, dan kepercayaan antar elite sudah kuat. Akan tetapi, sempat muncul keraguan yang ada antara elite tersebut. Meskipun hanya ada sedikit ketidakpercayaan, namun hal ini menandakan bahwa sebenarnya ada indikasi bahwa lemahnya kepercayaan antar elite.

Kemudian norma yang ada dalam melakukan perjuangan yaitu adanya secara resmi berupa surat keputusan dan aturan lainnya juga menjadi bukti bahwa dari berbagai kalangan telah menyatu dan hal ini juga berupa modal sosial inklusif. Pada rencana pembentukan Bangka Utara tak hanya terbatas waktu, melainkan juga terus berproses. Kelanjutan dari proses yang dilakukan yaitu dari atas hingga bawah, baik itu pemerintah maupun dukungan masyarakat.

Selanjutnya jaringan modal sosial yang terdapat pada pembentukan Kabupaten Bangka Utara bergerak di berbagai bidang. Jaringan ini dilakukan untuk dapat menunjang proses agar lebih mudah melalui

bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan pariwisata. Tokoh akademisi, pengusaha, elite politik, tokoh pemuda, dan elite lainnya berperan sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing.

B. Implikasi Teori

Dalam menganalisis peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara, maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori elite Pareto dan Mosca. Teori elite kedua tokoh ini membahas mengenai pembagian elite yang ada di dalam masyarakat, yaitu elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah. Elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah berada dalam masyarakat di kawasan Utara Pulau Bangka (Bangka Utara). Elite ini berperan sesuai dengan posisi yang diduduki, sehingga baik elite yang memerintah maupun elite yang tidak memerintah menjalankan peran dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Peran yang dilakukan oleh elite lokal yang ada di Kabupaten Bangka, khususnya di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip terdiri dari berbagai kalangan, di antaranya RT, RW, Lurah, Camat, anggota DPRD Belinyu-Riau Silip, tokoh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lainnya. Elite lokal yang bisa dibagi menjadi dari elite yang tidak memerintah yaitu tokoh pemuda, dan tokoh akademisi, sedangkan elite yang memerintah yaitu para anggota dewan ataupun bagian pemerintahan (lurah, camat, dan lain-lain). Elite ini saling

bekerjasama untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Selain teori elite Pareto dan Mosca, dielaborasi juga dengan modal sosial Robert Putnam. Modal sosial menurut Putnam merupakan suatu tindakan yang terkoordinasi yang di dalamnya terdapat kepercayaan, norma, dan jaringan. Peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara juga terdapat modal sosial. Modal sosial yang ada digerakkan oleh elite lokal untuk memperkuat upaya pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Modal sosial ini ada yang eksklusif dan inklusif. Modal sosial eksklusif terjadi pada hubungan kekerabatan yang ada untuk mempermudah akses pertemuan dengan beberapa tokoh elite yang penting. Sementara itu modal sosial inklusif juga ada dalam menyatukan beragam ranah sosial yang kini juga terdapat berbagai kalangan untuk bersama dalam mendukung proses pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Peran elite lokal juga berkaitan dengan dukungan modal sosial yang ada. Kepercayaan masyarakat, dalam diri elite lokal, dan saling percaya antar elite lokal untuk bergerak demi terealisasinya Kabupaten Bangka Utara sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan bersama. Berbagai dukungan yang ada seperti dukungan pendanaan, dukungan sarana dan prasarana, dukungan fasilitasi kegiatan, dan dukungan pengelompokan elite merupakan hasil awal dari kepercayaan yang terjalin antara yang satu dengan yang lainnya. Kepercayaan ini pula

yang menjadi bagian dari partisipasi para elite lokal untuk turut berperan memberikan berbagai bentuk dukungan pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Kemudian adanya norma dalam modal sosial yang berisi aturan tertulis berupa Surat Keputusan (SK) dan aturan-aturan yang tidak tertulis namun bisa menjadi dasar untuk bergerak bersama di tengah beragamnya masyarakat di kawasan Bangka Utara. Pada awalnya hanya terbatas pada teman akrab atau kenalan yang dekat saja, akan tetapi seiring berjalanya proses yang dilakukan maka modal sosial inklusif juga nampak bisa menaungi segala perbedaan atau keberagaman sosial yang ada.

Selain itu, ada jaringan dalam modal sosial yang terbentuk untuk memperlancar akses yang dibutuhkan. Jaringan bergerak di berbagai yaitu bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan pariwisata. Bidang-bidang tersebut memiliki peran yang berbeda namun kemudian bersinergi untuk bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Jaringan, norma, dan kepercayaan menghubungkan beragam perbedaan dari ranah sosial yang menghasilkan timbal balik yang luas dalam menunjang pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat, meskipun rencana pembentukan Kabupaten Bangka Utara belum terealisasi secara menyeluruh, namun harus tetap optimis dan terus mendukung rencana tersebut. Lebih baik lagi agar masyarakat dapat selalu bekerjasama dengan berbagai elemen lainnya.
2. Bagi elite lokal yang memerintah dan yang tidak memerintah, sebaiknya agar tetap bekerjasama dan saling percaya antar elite demi kemajuan bersama. Selain itu untuk tetap fokus pada upaya rencana pembentukan Kabupaten Bangka Utara, jangan sampai rencana ini hanya dipandang sebagai isu dalam persoalan politik pada saat kampanye saja.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kabupaten Bangka Utara dalam sudut pandang politik, atau juga jika memungkinkan melalui analisis wacana kritis.